

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ambiguitas pengertian ideologi masih menjadi sebuah wacana yang belum terselesaikan hingga hari ini. Tidak adanya pengertian baku mengenai istilah ideologi terkesan menjadikan ideologi berada di luar lajur kerangka keilmuan. Semestinya pembahasan ideologi dalam kerangka ilmu sosial dan politik memberikan falsafah dasar yang melingkupi karakteristik mazhab-mazhab keilmuan tersebut, ini dikarenakan ideologi merupakan validitas yang fundamental dalam kerangka sosial dan politik. Dalam penjabarannya ideologi menjadi tolak ukur hasil dari perkembangan pemikiran manusia yang ada dan berproses dalam dinamika sejarah masyarakat, karakteristik perjalanan sejarah masyarakat memberikan ruang yang dinamis dalam proses konsepsiannya.

Istilah ideologi dari berbagai ilmuwan menjadi keterwakilan tersendiri dalam memaknai ideologi sebagai sebuah pengertian, menurut Eagleton menyatakan “Tidak ada satupun bisa memberikan suatu definisi ideologi yang memadai”¹. Ideologi berada dalam keragaman ruang dialektik yang keberadaannya menjadi kontroversi yang akan selalu diperdebatkan. Sehingga pendefinisian baku dan tegas serta objektif tidak berkesuain dengan ruang dinamis dimana dia berada yaitu kerangka sosial yang luas. Baik interaksi orang perorangan, keluarga, Negara maupun pada kerangka yang lebih luas lagi yaitu masyarakat dunia. Sehingga keberagaman pengertian ideologi merupakan

sesuatu yang wajar terjadi di antara pemikir-pemikir tentang ideologi. Keberadaan ideologi di dalam masyarakat memang begitu absurd sehingga dalam menjabarkan landasan ilmiah akan mengalami cukup kesulitan karena keabsurdan basic analitisnya. Keabsurdan tersebut adalah yang memungkinkan adanya definitif ideologi begitu plural mengikuti konteks yang berlaku di dalam lingkungan sosial sebagai fondasi dalam menjabarkan ideologi dalam bentuk definitif.

Sifat masyarakat yang kompleks dan konsep ideologi yang abstrak bagi penulis ini merupakan suatu yang cukup relevan. Mengapa ideologi hingga saat ini masih belum menemukan adanya definisi ideologi yang baku. Misalkan saat kita mencoba bertanya tentang pengertian ideologi, maka banyak dari kita membahas ideologi dalam 'isme' atau aliran politik seperti Sosialisme, Komunisme, Liberalisme dan Konservatisme², dalam pengertian ini ideologi menjadi sebuah gagasan mengandung nilai yang akan terproyeksikan dalam setiap kehidupan masyarakat penganutnya, atau menjadi landasan serta panduan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita yang terangkum dalam ideologi tersebut. Misalkan ideologi Komunisme. Komunisme sebagai sebuah masyarakat yang berkembang dari Kapitalisme, dalam tahapan pertama Komunisme (sosialisme) Pembagian alat produksi menjadi tugas utama yang harus dilakukan Negara, pada tahap pertama Komunisme peran Negara begitu dominan. Negara sebagai lembaga transisional dengan konsep diktator revolusioner proletariat menuju masyarakat tanpa kelas (Komunisme tahap

Marx mengatakan:

”Dalam tahap tinggi masyarakat Komunis, setelah lenyapnya ketundukan yang membudak dari manusia pada pembagian kerja masyarakat; setelah bersamaan dengan itu lenyap pula pertentangan antara kerja badan dengan kerja otak; setelah kerja tidak lagi menjadi sarana untuk hidup saja, tetapi menjadi kebutuhan utama hidup; setelah bersamaan dengan perkembangan menyeluruh setiap individu tumbuh juga tenaga-tenaga produktif dan semua sumber kekayaan masyarakat mengalir dengan melimpah ruah—baru pada waktu itulah horizon sempit hak borjuis akan dapat dilampaui sepenuhnya, dan masyarakat dapat menulis pada panji-panjinya: ‘Masing-masing menurut kemampuannya, untuk masing-masing menurut kebutuhannya’ “. ³

Memasuki era moderinitas yang memungkinkan masyarakat untuk lebih membuka pandangan dalam konteks yang cukup luas sehingga mengharuskan masyarakat untuk berfikir dengan menggunakan rasionalitas, maka dari itu kekuatan ideologi yang berada dalam setiap tindakan masyarakat sebagai tuntunan nilai kembali terefleksi dalam kajian yang kritis. Kekuatan moderinitas, yang ditopang oleh kemajuan keilmuan akan menyebabkan pudarnya wacana utopian yang ada dalam kerangka ideologi. Wacana moderinitas memberikan pola pikir mekanistik dan pragmatisme kehidupan kemanusiaan dan hal inilah telah melahirkan asumsi-asumsi berakhirnya era ideologis.

Perongrongan terhadap berhala ideologi merupakan sebuah kosekwensi logis dari perkembangan moderinitas dan ilmu pengetahuan. Selama ini ideologi telah melakukan intervensi yang begitu jauh terhadap “otonomi kemanusiaan” dibawah taklukknya manusia dalam berbagai-bagai ideologi tertentu, maka manusia sendiri akan

mengalami kejenuhan terhadap “pengabdian ideologi”.⁴ Daniel Bell merupakan tokoh yang berada dalam garda depan dalam kegelisahan pemikiran ini, *The End of Ideology*” yang dikemukakan Sosiolog terkemuka dari Universitas Harvard, Amerika Serikat tersebut, di tahun 1962. Tesis itu menjelaskan realitas bahwa ideologi mati karena keinginan orang-orang untuk mencapai titik ekstrem kebesaran ideologi ternyata tidak tercapai.⁵

Apakah ideologi telah mati di era moderinitas. Namun kita dapat melihat, kekuatan ideologi masih begitu kuat dalam mekanisme struktural pemerintahan misalkan ideologi pembangunan yang ditekankan oleh pemerintahan Orde Baru menjadi sebuah propaganda khusus yang dibangun atas legitimasi politik totaliter, yang mengharuskan pembentukan struktur sosial masyarakat berada dalam arus moderinitas pembangunan. Maka dengan ini Ideologi masih menjadi sebuah potret yang tidak pernah kusam dalam perkembangan arus sejarah khususnya di negeri kita, fenomena-fenomena ideologi masih begitu berbekas dalam setiap kajian-kajian permasalahan yang ada dalam setiap gejolak sosial dan politik. Ideologi menjadi amunisi awal yang melegitimasi dalam setiap tindakan baik yang dilakukan dalam ruang sosial maupun politik.

Kediktatoran rezim “Orde Baru” merupakan dampak dari pengkultusan terhadap ideologi pembangunan yang dicanangkan oleh rezim sebagai agenda pokok yang nantinya akan berimplikasi terhadap wilayah politik, ekonomi, budaya , hukum dan

⁴Nuswantoro, *Daniel Bell, Matinya Ideologi*; Yayasan INDONESIA TERATA, Magelang 2001 di Pengantar Penerbit

⁵ http://www.kompas.com/000/05/Ideologi_tak_pernah_mati.html diakses pada tanggal 4 Maret

lain-lain. Pola efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi landasan utama dalam penentuan kebijakan, menurut Asep Setiawan.⁶ Unsur-unsur ideologi ini adalah pembuatan kebijakan publik yang rasional, efisiensi, efektivitas dan pragmatisme. Unsur-unsur ini mengutamakan ketertiban. Oleh karena itu kemudian dirumuskan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.

Developmentisme sebagai ideologi taraf utama keberhasilannya harus didukung kestabilan politik, dan dalam menjalankan fungsi ini rezim Orde Baru menjalankan kekuasaannya dengan format militer. Ideologi militer (militerisme), Militerisme erat kaitannya dengan penggunaan kekerasan dalam pemerintahan dan dalam masyarakat. Militerisme berarti pula merasuknya nilai-nilai, sikap, dan perilaku militer dalam pemerintahan dan masyarakat, seperti komando, hirarkhi, disiplin, pemaksaan, loyalitas, kekompakan, dan sebagainya.

Watak militeristik ini dapat dilihat dari gaya kepemimpinan Soeharto, yang merupakan aktor penting dalam menanamkan ideologi pembangunan sebagai sebuah landasan pemerintahan dan bahkan Soeharto mendapat julukan sebagai “Bapak Pembangunan”. Untuk menjamin kestabilan politik demi akselerasi ideologi pembangunan rezim Orde Baru menciptakan politik yang bebas dari konflik ideologis, dalam tahap awal pemerintahan Orde Baru. Soeharto mencoba menghilangkan dan bahkan melarang ideologi komunisme dengan mengeluarkan TAP MPRS No.25/1966, menurut M Dawam Raharjo.⁷ Motif utama dari Ideologi Pembangunan adalah membendung pengaruh komunisme di Negara dunia ketiga (termaksud Indonesia) yang

⁶ <http://theglobalpolitics.com/?p=64>..diakses pada tanggal 17 januari 2010

⁷ ..

cenderung memilih bentuk lain sosialisme .Bahkan para penganut paham komunisme yang tergabung dalam PKI (Partai Komunis Indonesia) para anggotanya serta pendukungnya dipenjarakan, dibuang dan disingkirkan secara politik dan sosial. Bahkan proses diskriminasi rezim Orde Baru berlanjut terhadap masyarakat yang dituduh mempunyai keterkaitan dengan PKI, tepatnya pada agustus 1985 dengan mengkampanyekan program “Bersih Lingkungan”dengan maksud untuk membersihkan instansi-instansi dari orang yang diduga memiliki hubungan dengan PKI dalam rangka “membasmi” PKI era 1960 hal ini dibutuhkan oleh Orde Baru sebagai bagian taktik untuk mengontrol masyarakat.⁸

Di sisi yang lain, demi menjaga dominasi ideologi dalam parlemen. Rezim Orde Baru menyederhankan peserta pemilu setelah pemilu pada tahun 1971 dengan mengfusikan partai menurut kriteria ideologinya, misalkan partai yang berideologi non-islam tergabung dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dan Partai yang berideologi Islam tergabung dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan) namun disatu sisi ada Golkar (Golongan Karya) yang bukan merupakan partai politik tapi organisasi yang boleh ikut pemilu bersama partai yang ada. Dan pengukuhan fusi partai dan keberadaan Golkar disahkan dengan dikeluarkannya UU RI No.3 Tahun 1975 tentang tentang partai politik dan Golongan Karya yang isinya mempertimbangkan pendayagunaan partai politik dan organisasi-organisasi sosial politik.⁹

Golkar yang merupakan salah satu kekuatan rezim Orde Baru dalam wilayah penguasaan legalitas konsitusi dan salah satu unsur utama pendukung ideologi

⁸ Wardaya T, Baskara dkk, *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto*. Galang Press, Yogyakarta 2007 hal 29

⁹ <http://www.scribd.com/doc/200012402/Buku-Undang-Undang-Polpartai-pada-masa-rezim-orde-baru>

pembangunan, di masa Orde Baru. Golkar selalu menang secara mutlak dengan penguasaan suara mayoritas dalam pemilu. Ternyata adanya UU no.3 tahun 1975 juga sangat membantu Golkar dengan menyebutkan bahwa kepengurusan partai-partai terbatas pada tingkat pusat, Dati I dan Dati II. Ketentuan ini kemudian dikenal dengan istilah *floating mass* (masa mengambang). Dua partai lain dibenarkan aktif sampai tingkat kabupaten atau Dati II, tetapi Golkar yang bukan merupakan partai politik sehingga bebas untuk bergerak sampai tingkat desa dan bekerjasama dengan aparatur pemerintah dalam pelaksanaannya sehari-hari. Aparatur pemerintah mengintervensi berlebihan terutama di daerah terpencil sebagai usaha untuk mencapai target yang diinginkan.¹⁰ Selain itu perolehan suara Golkar juga diperoleh dari instansi Birokrasi, dimana pegawai negeri harus menjadi anggota KOPRI dan para isteri pegawai negeri harus masuk dalam Dharma Wanita, kedua organisasi itu merupakan unsur Golkar.¹¹

Dan selain itu peran presiden Soeharto begitu dominan dan menguasai seluruh element pemerintahan yang ada, Menurut Wiliam Lidle (1985).¹² Kekuasaan Kepresidenan atau *Presidency* menempati struktural puncak piramida yang ada dalam struktural kekuasaan, Presiden dalam Orde Baru dapat mengontrol rekrutment politik dalam Negara. Termaksud rekrutmen jabatan lembaga tinggi Negara, rekrutment lembaga Legislatif serta Yudikatif, dan bahkan Presiden juga mempunyai 'Hak preogratif' untuk menentukan proses rekrutmen di kalangan Angkatan Bersejata. .

¹⁰ Ibid

¹¹ Hisyam, Muhammad, Krisis Masa Kini dan Orde Baru, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2003 hal33

¹² Coffee, A. 1998. *Dealing with Democracy: The Role of the State in the Process of Democratization*. Yogyakarta 2002, hal

Dalam kehidupan politik Nasional Orde Baru, Angkatan Bersenjata, terutama Angkatan Darat mempunyai perananan politik yang sangat penting dalam menjaga stabilisator dan dinamisator politik¹³. Sehingga dalam tugasnya aparatus militer tersebut, sering menggunakan kekerasan dan ini dapat dilihat dari beberapa pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dilakukan oleh militer seperti,¹⁴ di tahun 1965 Pembantaian massal terhadap masyarakat yang dituduh anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menelan korban sekitar 500 ribu jiwa, 1970-1990 Pembantaian Massal terhadap Masyarakat Papua yang dituduh sebagai gerakan separatis menelan korban 8.000 jiwa, 1973-1998 pembantaian masal terhadap rakyat Timor-Timor yang dituduh tergabung dalam gerakan separatis yang menelan korban sampai 300 ribu jiwa, dan Pristiwa DOM (Daerah Operasi Militer) Aceh yang menelan korban hingga 30 ribu jiwa. Pristiwa Tanjung Priok yang menelan hingga 250 ribu juta jiwa, pembantian di gedung Ombo, pembantain di waduk Nipah Madura dan banyak yang lainnya.

Dominasi kekuasaan totaliter yang dijalankan oleh Orde Baru, dalam kajian ideologi menurut Hannah Ardet yang memadang ideologi sebagai hal yang negatif, maka Totaliteriat merupakan hakikat dari semua ideologi. Baginya ideologi berisi semua unsur yang totaliter¹⁵. Sentralisme kekuasaan yang ditopang oleh budaya patrenialisme dalam Orde Baru memungkinkan Soeharto menjadi kekuatan pokok dari

¹³ Ibid hal hal 38

¹⁴ <http://www.mail-archive.com/proletar@yahoogroups.com/msg08182.html> diakses pada tanggal 9 maret 2010

¹⁵ Djalala Riaka Diah, *Kebudayaan Negara Melayu Ke Masyarakat Kelas Bawah*, Yogyakarta 2004 hal

Ideologi pembangunan, singkatnya kepada “Bapak” (Soeharto) seluruh rakyat menyerahkan segala sesuatu yang menyangkut permasalahan pembangunan.

Dan Paternalisme tersebut menurut Hannah Arendt yang nantinya akan mendukung sentralisme kekuasaan, sehingga mengakibatkan tersingkirnya oposisi konsitutional maupun sosial yang berarti mematikan pluralitas dan inisiatif individu. Karena ideologi yang berlaku dalam tipe kekuasaan seperti itu merupakan ideologi tertutup, ideologi yang tidak memberikan ruang terhadap argumentasi kritis dan menolak perbedaan, dan ideologi seperti ini memunculkan tirani logika, yaitu tunduknya manusia pada logika. Manusia menyerahkan kebebasannya pada tirani, ideologi tertutup ini diterapkan melalui mekanisme propaganda dan teror yang dilakukan oleh penguasa. Propaganda dilakukan untuk mencabut pikiran dari pengalaman dan realitas dan teror digunakan penguasa untuk meraih dominasi, dan kedua hal tersebut sarat dengan kekerasan.¹⁶

Ideologi dalam penjabarannya selalu mendapatkan definisi yang stagnan sehingga analisis yang dilakukan cenderung pragmatis, menganggap ideologi sebagai sebuah konsep yang mengalami ketidakberdayaan dalam membedah gejala-gejala sosial. Louis Althusser mencoba memberikan ruang yang cukup dinamis pada ideologi serta pengaruhnya, sebagai sebuah piranti yang cukup masif digunakan negara demi kepentingan kelas dominan.

Louis Althusser mengkonsep teoritisnya untuk mengembalikan ajaran Marx pada level yang sebenarnya. Louis Althusser lahir tahun 1918 di Aljazair, Perancis.

dengan Partai Komunis sejak tahun 1948 di Paris, pada tahun 1980 kondisi kesehatan Louis Althusser cenderung menurun dan akhirnya meninggal pada tahun 1990. Louis Althusser mulai mengerjakan bukunya "*For Marx*" 1960 dan "*Lenin of Philosophy*" tahun 1969, dia disebut sebagai pembaruan ajaran Marxisme. Dengan konsep strukturalismenya, secara umum dia ingin mengembalikan ajaran Marxian dan membersihkan ajaran Marx dari marxisme ortodok yang di bangun dengan Romatis "Humanis"¹⁷ yang berpijak dari Marx Muda

Pemikiran ideologi Althusser yang masuk dalam klasifikasi mazhab marxisme, menurut Althusser. mengambil ideologi menurut Marx, Ideologi bukan suatu yang Abstrak. Ideologi merupakan piranti yang dengannya ide-ide dari kelas dapat diterima di masyarakat sebagai suatu yang normal dan natural, segenap pengetahuan merupakan hal yang *class-based*, telah terdeskripsikan dalam asal muasal kelasnya dan bekerja demi kepentingan kelas yang bersangkutan¹⁸. Misalkan ideologi kelas borjuis, bekerja untuk mempertahankan posisi kelas proletar dalam keadaan yang ter-subordinat dengan mempresentasikan individu yang imajiner pada kondisi-kondisi nyata dari eksistensinya¹⁹.

Individu disini menjalankan konsepsi ideologi sebagai sebuah kebenaran, yang pada dasarnya hampir semua pandangan-pandangan yang terejawantahkan dalam ideologi bersifat imajiner misalkan Althusser mencontohhkan pandangan tersebut seperti

¹⁷ Althusser sering berbicara tentang "humanisme teoritis" dengan ini dia ingin menghindarkan salah paham seolah-olah dia menentang humanisme yang boleh disebut "etis", yaitu pandangan yang menekankan martabat manusia, hak-hak asai manusia dan sebgainya, Maksudnya trntu tidak demikian. Ia hanya menolak pendirian yang menjadikan manusia pusat sejarah dan pusat realitas.

¹⁸ Louis Althusser, *Essays on Ideology*, London: NLB, 1971, hal. 120-121.

(Iman kepada Tuhan, Keadilan, Tugas, dan sebagainya) ruang imajiner yang diciptakan ideologi mempunyai tujuan agar individu tersebut menjadi subjek-subjek yang aktif untuk mempertahankan bentuk strukturalisasi yang telah melingkupinya, bentuk *inter-relasi struktural* agama, etika, politik, estetika dan sebagainya yang keberadaannya dijamin oleh ideologi penguasa merupakan realisasi dari sebuah ideologi. Karena bagi Althusser tidak ada praktek apa pun (termaksud praktek dari state apparatus) kecuali berada dalam ruang lingkup ideologi.

Kajian ideologi dalam ruang lingkup Negara merupakan bentuk strukturalisasi politik yang berfungsi sebagai sebuah instrument perjuangan kelas atas dasar kepemilikan alat-alat produksi untuk mempertahankan kekuatan produksi yang berimplikasi dalam mempertahankan hubungan-hubungan produksi yang sudah ada antara kelas pemilik kapital (Borjuis) dan kelas pekerja (proletar), Negara yang coba dipahami Althusser dalam kajian Marxist sebagai alat dari kelas borjuasi untuk mempertahankan dominasinya pada kelas proletar. Negara tidak hanya selalu diidentikan hanya sebagai Aparatus Represif Negara (pemerintah, administrasi, Angkatan Bersenjata, Polisi, Pengadilan, Penjara dan lain-lain) yang berfungsi melalui kekerasan, tapi ada realitas lain yang tidak bisa dipungkiri berada disamping bekerja secara cukup aktif ditengah-tengah repesifitas Negara, dan realitas tersebut adalah Aparatus Ideologi Negara (AIN) yang terdiri dari (AIN Agama, AIN Pendidikan, AIN keluarga, AIN hukum, AIN politik, AIN budaya, AIN komunikasi) AIN adalah Aparatus

Negara yang merasuk dalam penguasaan hegemoni pola pikir, sehingga dalam akselerasi kerjanya AIN berada dalam ruang privat.²⁰

Mari kita coba kembali dalam kajian Orde Baru yang dijadikan penulis sebagai contoh bagaimana peran ideologi dalam mekanisme pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim otoritariat Orde Baru. Begitu kental wacana pragmatismenya ini ditandai dengan kriteria utama dalam konsep kebijakannya sebagai acuan dasar yang nantinya harus mempunyai orientasi terhadap penguatan pembangunan dengan menggunakan medium politisasi ideologi.

Dan *Aparatus Ideologis Negara* yang ada dalam kekuasaan Orde Baru yang bekerja melalui politisasi ideologi dalam bidang penyiaran yaitu salah satunya TVRI (Televisi Republik Indonesia). Televisi Indonesia di jaman Orde baru seperti TVRI dapat dipahami sebagai teori pers *Developmentisme*, salah satu varian dari teori pers otoritarisme²¹. TVRI kemudian berperan sentral terhadap proses komunikasi politik pemerintah. Dari sekedar medium untuk mendokumentasikan sejarah, TVRI pada akhirnya lebih berperan sebagai perangkat ideologis rezim berkuasa. TVRI pertamanya sebagai medium untuk memproklamkan program-program pemerintah, serta memperteguh konsensus Nasional tentang budaya Nasional, pentingnya pembangunan, tertib hukum dan menjaga kemurnian identitas bangsa. Dalam prakteknya, TVRI lebih banyak diperlakukan sebagai propaganda pemerintah²². Misalkan seperti program “Berita Nasional” menjadi wahana utama representasi simbolik dari ideologi pembangunan Orde Baru. Dalam peringatan ulang tahun TVRI yang ke-22, Semua

²⁰Lihat.. Althusser, Louis, *Tentang Ideologi*, Jalasutra, Yogyakarta, 2000 hal 21

²¹Sudibyo Agus, *Ekonomi Politik Media Pamigran*, LKIS Yogyakarta, 2004 di hal 282

kalimat dalam buku peringatan ulang tahun tersebut, mengarisbawahi pentingnya berita pembangunan: Berita dan feature yang diarahkan untuk mendorong pembangunan dan semangat persatuan dianggap sebagai prioritas utama, sementara sensornalisme dan eksploitasi kekerasan, peristiwa yang destruktif dan negatif, dibatasi (TVRI,1984;61)²³ . Sebab sejak berdirinya dari awal TVRI memang tidak diorientasikan sebagai media untuk memenuhi kepentingan-kepentingan publik. TVRI adalah medium propaganda politik ke luar dan dalam Negeri, serta medium konsolidasi kekuasaan dan monopoli informasi oleh pemegang kekuasaan²⁴ .

Dalam kajian Marxist pemikiran Louis Althuser mencoba membongkar kajian Marxisme klasik yang sempit memahami wilayah mode produksi sebagai wilayah determinisme ekonomi, dengan memberikan definitif yang cukup luas tentang tentang corak kerja Ideologi.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran ideologi bagi Aparatus Negara menurut Louis Althusser?

C. BATASAN MASALAH

Pengkajian “Peran Ideologi berada dalam batasan bagaimana Ideologi sebagai sebuah piranti khususnya bekerja dalam Aparatus Negara” yang bagi Louis Althuser dikenal sebagai Aparatus Ideologi Negara (AIN).

D. TUJUAN PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian atas peran ideologi bagi Aparatus Ideologis Negara menurut Louis Althusser, dengan beberapa tujuan yaitu;

1. Memahami dan menelaah peran ideologi bagi Aparatus Negara menurut Louis Althusser.
2. Mendeskripsikan dan mengkontektualisasikan mengenai peran ideologi bagi Aparatus Negara menurut Louis Althusser.
3. Melakukan penggalian gagasan mengenai peran ideologi dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang ideologi dan peran Aparatus Ideologi Negara khususnya Mahasiswa dan masyarakat umum di Indonesia.
4. Memperdalam wacana tentang peran ideologi dalam Aparatus Negara serta secara intelektual merupakan tanggung jawab, artinya, bermanfaat untuk melatih kemampuan intelektual dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis memberi pemahaman dan deskripsi tentang peran ideologi bagi Apratus Negara.

2. Manfaat Praktis.

Memberikan sumbangsih dasar konsep teoritis dan mempertajam daya analisa para peneliti untuk penelitian lapangan mengenai peran ideologi bagi Aparatus Negara.

F. KERANGKA DASAR TEORI.

1. Ideologi

a. Pengertian-Pengertian Ideologi

Kajian mengenai ideologi hingga saat ini masih mengalami polemik, khususnya dalam menjabarkan ideologi dalam pengertian yang baku antara beberapa teoritis yang membahas tentang ideologi. Dari konsep ilmu sosial ideologi adalah konsep yang paling abstrak, disebabkan karena ia mempersoalkan validitas gagasan paling fundamental yang kita miliki. Pada dasarnya ia masih merupakan konsep dalam perdebatan, yaitu konsep tentang definisi (dan karenanya juga tentang aplikasi), dari sesuatu yang mengalami kontroversi yang akut.

Ketidaksepehaman beberapa teoritis memang cukup wajar terjadi dalam kajian keilmuan. Dalam bukunya dengan judul *The Structure of Scientific Revolution*, Thomas Khun berpendapat, ilmu pada dasarnya tidak bersifat *linier akumulatif*. Ilmu bergerak pada tahapan-tahapan yang akan berpuncak pada kondisi normal, kemudian “membusuk” karena telah digantikan oleh ilmu atau paradigma baru. Demikian seterusnya. Paradigma baru mengancam paradigma lama yang sebelumnya juga menjadi paradigma baru, sehingga terjadi proses benturan dan perang antar paradigma²⁵.

Ideologi dalam kosa kata bahasa Inggris adalah *Ideology* yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ide* (*Ide/gagasan*) dan *logos* (*studi tentang/ilmu pengetahuan*) jadi secara harfiah ideologi merupakan ilmu tentang ide-ide, studi tentang asal usul ide dan dalam arti melioratif ideologi adalah setiap gagasan yang mempelajari keyakinan dan hal-hal yang ideal dan filosofis.²⁶ Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesi, ideologi

²⁵Sardar, Zainuddin. *Thomas Kuhn dan Perang Ilmu*; Jendela, Yogyakarta, 2002 kata pengantar

²⁶ Darius Laksana, *Kamus Filosof*, PT Gramedia, Jakarta, 1996 hal 206

merupakan sekumpulan konsep bersistem atau cara berfikir seseorang atau suatu golongan.²⁷

Bagus Takwin dalam bukunya “Akar-Akar Ideologi” memetakan pengertian ideologi dalam beberapa bahasan pokok. *Pertama*, pengertian ideologi merujuk pada ideologi negara, terdiri dari prinsip-prinsip yang berperan sebagai dasar sekaligus tujuan negara. *Kedua*; ideologi mengarah pada pernyataan-pernyataan atau pengetahuan tidak berkesuaian dengan kenyataan. *Ketiga*; penggunaan kata ideologi merujuk pada sekumpulan kepercayaan untuk memotivasi kelas atau kelompok guna melakukan pembebasan bagi dirinya. *Keempat*, istilah ideologi merujuk pada ketidakseimbangan kedudukan antara dua pihak yang berkomunikasi. *Kelima*; ideologi sebagai proses naturalisasi hal-hal yang non-alamiah diklaim sebagai suatu yang alamiah²⁸.

Keberagaman ideologi apabila ditinjau dari pemetaan definisi tentang ideologi di atas jelas para pemikir ideologi ternyata dalam mendefinisikan ideologi untuk menjadi pengertian, lebih pada, sebagai kajian keilmuan sosial memiliki unsur-unsur kepentingan terselubung atau bahkan secara terbuka memanifestasikan kepentingannya dalam pembahasan tersebut. Dengan karakteristik tersebut ideologi pada dasarnya memiliki kajian yang tersistematisasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan.

Kompleksitas permasalahan yang tervariabel dalam pembahasan ideologi berimplikasi pada perbedaan sudut pandang dari beberapa tokoh ideologi. Perbedaan sudut pandang tersebut berdampak pada perbedaan bagaimana para teoritis tersebut

²⁷ Sugono Dedi dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008 hal 567

²⁸ Takwin, Bagus, *Akar-Akar Ideologi*, Jakarta, Yogyakarta 2002 hal 5



memahami ideologi dan pada hal inilah pengertian yang berbeda tentang ideologi itu muncul.

Mengutip Eagleton pengertian-pengertian ideologi yang selama ini beredar adalah sebagai berikut²⁹:

1. Proses produksi makna-makna, tanda-tanda dan nilai-nilai dalam kehidupan sosial.
2. Sekumpulan karakteristik ide atau pikiran dari sebuah kelompok atau kelas tertentu.
3. Ide-ide yang membantu melegitimasi kekuatan politik yang dominan.
4. Ide-ide palsu yang membantu melegitimasi kekeutan politik yang dominan.
5. Distorsi komunikasi yang sistemik.
6. Sesuatu yang menempatkan subjek dalam posisi tertentu.
7. Bentuk pikiran yang dimotivasi oleh *interest* sosial.
8. Pemikiran tentang identitas.
9. Ilusi sosial yang niscaya.
10. Perpadauan (*conjecture*) diskursus dengan kekuasaan.
11. Media tempat-tempat aktor yang sadar mamahami dunia.
12. Serangkaian kepercayaan (*beliefs*) yang menjadi orientasi dari tindakan.
13. Ketidakjelasan antara realitas linguistik dan fenomenal.
14. Akhir pemakaian dalam proses semiotik

15. Medium yang sangat penting bagi individu untuk menjalani hubungan-hubungan mereka dalam struktur sosial.

16. Proses terjadinya 'pengubahan' kehidupan sosial menjadi realitas ilmiah.

Dalam memudahkan pengkajian klasifikasi pengertian ideologi menurut Bagus Takwin dalam bukunya 'Akar- Akar Ideologi', Ideologi harus dikemukakan dengan beberapa pendekatan yang didasarkan pada kategori-kategori tertentu yang nantinya dapat digunakan untuk memahami konsep dan gejala ideologi, tiga pendekatan tersebut sebagai berikut.³⁰

1. Pengertian ideologi ditinjau dari pendekatan Aliran

Pendekatan aliran didasarkan pada asumsi bagaimana dan dari mana manusia mendapatkan pengetahuan. Berdasarkan asumsi tersebut, pengertian ideologi dapat dikelompokkan dalam dua pengertian umum:

- a. Ideologi sebagai sebuah seperangkat nilai dan aturan tentang kebenaran yang dianggap alamiah, universal dan menjadi rujukan bagi tingkah laku manusia. Isi ideologi disini dianggap sebagai sesuatu yang alamiah dan universal, dalam kategori aliran rasionalisme-idealisme dan disini ideologi memiliki makna yang positif.
- b. Ideologi sebagai sebuah studi yang mengkaji bagaimana ide-ide tentang berbagai hal diperoleh manusia dari pengalaman serta tertata dalam benak untuk kemudian membentuk kesadaran yang mempengaruhi tingkah-laku. Berdasarkan kategori aliran penganut ini dapat digolongkan dalam aliran

empirisme-realis. Dalam pengertian ini ideologi dapat bernilai negatif maupun positif tergantung pada ide-ide apa yang berpengaruh dan bagaimana akibatnya pada kehidupan manusia.

2. Pengertian ideologi dari pendekatan aspek yang menjadi ranah ideologi.

Selain pengertian dari kategori aliran (rasionalisme-idealisme dan empirisme realis) dan valensi (positif dan negatif). Pengertian ideologi juga dapat ditelusuri dari kategori aspek ideologi menjadi ranah kesadaran–ketaksadaran, bahasa dan komunikasi, serta kekuasaan dan posisi sosial.

3. Pengertian ideologi ditinjau dari pendekatan historis berdasarkan kronologi pencetusnya.

Berbagai pengertian, baik dari kategori aliran dan valensi maupun aspek dan ranah ideologi, dapat dibandingkan secara kronologis. Analisis perbandingan secara kronologis mengenai pemikiran tentang konsep ideologi biasanya didasarkan pada pembagian kelompok pemikiran sebelum dan sesudah Marx. Pemikiran sejak Marx hingga kini dibagi lagi menjadi pemikiran yang didasari oleh konsep ideologi dari Marx serta pemikiran yang lepas dari pengaruh Marx yang tidak jarang disebut sebagai “pasca ideologi” . pemikiran Marx dianggap sebagai tonggak penting dalam kajian ideologi karena kajiannya yang komperhensif dan berpengaruh luas.

Analisis yang akan digunakan untuk penafsiran ideologi. Kali ini penulis, menggunakan pendekatan historis. Karena konteks yang di bahas mempunyai kesnesifikan historis yang kuat dalam penjabaran pemikiran. Paradigma yang digunakan

oleh Louis Althusser untuk membentuk tatanan teoritisnya adalah paradigma Marxisme yang telah membentuk mazhab ideologi sendiri.

b. Kesejarahan Pengertian Ideologi

Berbeda dari term-term kontroversial sejenis (seperti demokrasi dan kebebasan misalnya) ideologi baru berusia sekitar 200 tahun. Ia adalah hasil dari kehancuran sosial, politik dan intelektual yang menyertai Revolusi industri; tersebarnya gagasan demokrasi, politik gerakan massa, sebuah gagasan menganggap bahwa, karena kita telah menciptakan dunia maka kita juga bisa menciptakannya kembali. Menurut filosof sosial Jerman, Jurgen Habermas pandangan dunia yang baru ini:³¹

“Muncul dari dogmatisme penafsiran tradisional terhadap dunia dan klaim karakter ilmiah. Mereka masih mempertahankan fungsi legitimasi, dan karenanya juga menjaga relasi kekuasaan yang ada saat itu yang tidak dapat diakses oleh analisis serta kesadaran publik. Dengan cara inilah ideologi dalam pengertian terbatas, pertama kali muncul. Ia menggantikan legitimasi tradisional terhadap kekuasaan melalui kemunculannya dalam selimut *science* modern, dan mencari justifikasi dalam kritik ideologi. Ideologi sama tuanya dengan kritik ideologi. Dalam pengertian ini maka tidak ada ideologi pra-borjuis.”

Jorge Larrain juga menyatakan timbulnya persoalan yang selanjutnya berasosiasi dengan konsep ideologi, erat hubungannya dengan pembebasan kaum borjuis dari belenggu feodal dan dengan sikap pikiran modern baru yang kritis. Oposisi kritis terhadap aristokrasi bertanah yang dibarengi oleh kritik dari membenaran-pembenaran *scholastic* untuk menjalankan kekuasaan. Dengan etika buruh borjuis baru, yang menentang masyarakat abad pertengahan serta memelihara buruh tani, ada pandangan ilmiah kritis baru yang menekankan pengetahuan alam praktis. Renungan diganti oleh

³¹ Leland M. David, *Ideologi Teori*, Alfabeta, Yogyakarta, 2005, hal. 4

pengamatan sebagai produksi, urutan inti (*order of essses*) yang hirarkis dan teosentris; yang harus diterima dengan pasif, diganti dengan pendekatan kritis untuk mencari bab manusia sendiri dalam daerah kriterium kebenaran yang baru. Sejak awal persoalan ideologi timbul berkaitan erat dalam praktek politik dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Istilah ideologi pertama kali digunakan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) pada abad ke 18. De Tracy secara tegas menyebut ideologi dan menggarapnya secara sistematis. Tetapi perenungan yang lebih dalam (*preokupasi*) dengan beberapa persoalan yang dimunculkan oleh pengertian ideologi telah dimulai jauh lebih awal. Ada fenomena yang mengaitkan antara legitimasi intelektual dari dominasi sosial dengan berbagai sumber penyimpangan mental dalam pengetahuan realita selama ada masyarakat-masyarakat golongan³².

N. Marchievelli (1469 – 1520) wakil dari kaum borjuis awal, barangkali adalah pengarang pertama yang membicarakan soal-soal secara langsung yang berkaitan dengan fenomena ideologi. Dalam studi teorinya, Marchievelli menggunakan metode komperatif dalam pedekatannya studi politik dengan mengandalkan sejarah sebagai data empirisnya. Penekanannya bukan pada riset murni tetapi pada suatu penemuan hukum universal suatu tindakan yang menjadi dasar keberhasilannya. Dengan menawarkan analisis empiris yang rasional tentang Negara dan politik modern, tulisan-tulisannya (meskipun muncul dalam bentuk ujaran-ujaran praktis) dipandang sebagai kunci

³²Larrain Jorge, *Konsep Ideologi*; LPKSM Yogyakarta 1997 hal 7

pembuka dari ilmu politik kontemporer.³³ Observasinya yang dalam tentang praktek politik para pangeran, dan pada tingkah laku manusia dalam politik, memenuhi konsep ideologi pada konsep selanjutnya. Meskipun dia tidak menggunakan istilah “ideologi” sama sekali, beberapa elemen konsep ini muncul, *pertama*; ketika dia menghubungkan kecondongan penilaian manusia dengan selera dan kepentingan. Merasa heran mengapa orang-orang sering parsial (berat sebelah) dalam mengkritik kekinian, Machavelli membantahnya dengan mengatakan bahwa³⁴:

“...karena selera manusia itu berubah, meskipun keadaan-keadaan mereka tetap sama, maka tidak mungkin hal-hal kelihatan sama bagi mereka karena mereka mempunyai selera lain, kepentingan lain, titik pendirian lain.... sebagai gantinya, menyalahkan waktu mereka harus meletakkan kesalahan pada penilaian mereka sendiri.”

Kedua; yang penting dibuat Marchievelli adalah cara dia menghubungkan agama dengan kekuasaan dan dominasi. Dengan jelas dia mengantisipasi tema yang terus muncul yaitu tentang konsep ideologi, misalkan bahasan mengenai fungsi-fungsi sosial dari pemikiran keagamaan. Marchiavelli heran mengapa bangsa-bangsa terdahulu mengalami kebebasan dari pada orang-orang sejamannya. Jawabannya ialah bahwa perbedaan itu terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan sebagaimana yang dikatakannya³⁵:

“... Agama kita telah memuliakan orang-orang yang rendah hati dan tafakur, daripada orang-orang yang bekerja. Agamalah yang menetapkan kebaikan tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri dan sikap memandang rendah untuk hal-hal keduniawian. Pola hidup ini, karenanya, tampak berbuat dunia itu lemah, dan menyerahkan diri sebagai mangsa bagi mereka yang jahat,

³³ Schamandt, I. Henry, *Filosofat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman*

yang menjalankan dengan sukses dan aman, karena mereka itu sadar bahwa orang-orang menjadikan sorga sebagai tujuan pada umumnya beranggapan bertahan daripada membalas dendam, terhadap perbuatan mereka yang tidak adil.”

Aspek *ketiga* dari ide-ide Machiavelli yang dapat dihubungkan dengan ideologi ialah pertimbangan-pertimbangannya mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Para pangeran harus belajar mempraktekkan tipuan karena kekuatan fisik tidak mencukupi. Hampir tidak ada kasus orang berbudi yang memperoleh kekuatan besar. “ Hanya dengan menggunakan kekuatan yang terbuka dan tidak berkedok”, kekuasaan dapat dijalankan dengan baik hanya dengan tipuan.³⁶

Sumbangan Machiavelli kepada praktek politik dilengkapi oleh berbagai perkembangan lain dalam bidang ilmu pengetahuan, dengan dis-integrasi masyarakat abad pertengahan. Pendekatan ilmiah yang baru dari pengetahuan alam menerima dorongan dan mulai mengganti filsafat skolastik.³⁷

Perkembangan pengetahuan alam yang diteliti dan terbatas pada pokoknya bukan karena orang-orang tidak dapat mengetahui dunia, karena rintangan buatan manusia yang telah mencegahnya. Inilah sebab faktor yang mengganggu perkembangannya itu lahir. Dengan kata lain lahirnya ilmu pengetahuan perlu dibarengi oleh kritik terhadap metode pengamatan yang dulu. Keraguan terhadap metodologi ilmu pengetahuan, serta mulai timbulnya sebuah penghancuran terhadap penghalang yang telah dibuat oleh manusia sendiri. Francis Bacon (1561-1626) menerapkan metode

induksi dalam pengetahuan seperti kata Jurgen Larrain metode induksi Francis Bacon dalam karyanya *Novum Organon* yang observasional mengganti metodologi deduktif pada logika formal dalam mendekati realalitas sebagai subjek observasi yang tertuang dalam *Organon* karya Aristoteles, yaitu dengan mengemukakan konsepsi idola, yang merupakan gambaran corak berfikir irasional dalam masyarakat yang menutup nalar perkembangan ilmu.

Bacon³⁸ mengelompokkan konsepsi berhala (idola) menjadi empat golongan ; Berhala *pertama* yaitu suku-suku, termaksud kecenderungan untuk menerima apa yang disakralkan oleh tradisi atau membiarkan nafsu mencampuri apa yang diperoleh pengetahuan rasional, *kedua*; Berhala *dua* adalah berhala yang muncul dari sudut pandang individu yang sering kali menghindari prespektif yang lebih umum, *ketiga*; berhala *pasar* adalah bahasa, yang menjadi simbol bagi interaksi sosial sering kali berberda dengan realitas dan karenanya. Sekali lagi merupakan hambatan dari pemahaman rasional. Dan *ke-empat*; berhala *teater* adalah konsepsi dogmatis tentang masa lalu yang biasanya tidak mempunyai landasan empiris dan tidak lebih baik dibanding dengan drama fiksi.

Idola *pasar* merupakan penyusun yang penting dalam konsep ideologi³⁹ Idola *Pasar* berkaitan dengan bahasa. Kata *pasar* tersebut merupakan hasil pembentukan pergaulan dan asosiasi antar satu orang dengan orang lain, disana terjadi sebuah perdagangan sesama manusia. Bentuk asosiatif tersebut terjadi karena ada pembicaraan yang terjadi dalam pergaulan dan perdagangan. Manusia mulai belajar tanda-tanda bahasa

³⁸ Lihat , Leland, Mc, David, *Ideologi Tanpa Akhir...* Log Cit hal 6

³⁹ Lihat , Leland, Mc, David, *Konsep Ideologi*, Onit hal 12

sebelum mereka mencoba untuk mengenali dirinya melalui pengalaman, dalam penjabaran tanda-tanda tersebut baik yang bersifat buruk sekalipun menjadi indentifikasi Bacon terhadap konsep idola pasar yang berasal dari timbal-balik pergaulan manusia dengan bahasa sebagai sarana. Ketidakjelasan makna tanda yang terperangkap dalam bahasa merupakan pemutar balikan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan ini merupakan bentuk pengakuan ideologi.

Dalam *The Advancement Of Learning*, Bacon⁴⁰, dalam karyanya tersebut banyak ber-orientasi terhadap pemikiran yang menanamkan unsur modernitas, dan dia sebagai orang yang pertama kali menyebutkan “Ilmu Pengetahuan adalah kekuasaan” dalam pengungkapannya, Bacon, menekankan kepada hal yang baru. Landasan yang dibangun dengan menjadikan Filsafat sebagai sebuah petunjuk praktis; Dengan kemampuan, khususnya dalam penemuan dan penciptaan ilmiah, Manusia dapat menguasai kekuatan-kekuatan alam, Walaupun pada dasarnya Bacon tidak menolak nilai-nilai teologis sebagai jalan yang harus ditempuh manusia, tapi dia menolak dalam pengungkapan atas sebuah fenomena, yang mencampur-adukan nilai-nilai teologis dengan penelitian. Karena penjelasannya harus menyikap kepada sebuah kepastian, intinya harus ada sebuah pemisahan wilayah yang cukup jelas dalam basic analisisnya antara teologi dan filsafat. Kemenangan iman yang terbesar adalah saat dogma menjadi begitu tampak absurd bagi akal murni.

⁴⁰ Bussell, Bertand, *Sejarah Filsafat Barat*, Duta, Yogyakarta, 2007, hal. 712

Teori Baconian khususnya tentang berhala sangat mempengaruhi tradisi empirisme⁴¹ di Inggris seperti yang terdapat pada pemikiran Hobbes dan Locke, serta memberikan landasan yang cukup kokoh terhadap tradisi pencerahan di Prancis yang nantinya membentuk sebuah konsep tentang ideologi. Pencerahan sudah menampakkan dirinya sebagai sebuah kekuatan yang menentang dogma teokrasi. Perubahan secara kualitatif itu tampak pada pemikiran Hobbes, penerus tradisi sistematis Baconian. Hobbes mengagumi metode matematis, bukan hanya dalam matematika murni tetapi juga dalam implikasi-implikasinya. Hobbes secara khusus mengambil metode *resoluto-compositive* yang didapatkan dari Galileo. Menurut metode ini, fenomena kompleks dapat dijelaskan dan dapat diuraikan menjadi gerakan-gerakan dan komponen-komponen sederhana. Segera setelah elemen-elemen ini dipahami, maka seluruh cara kerjanya yang kompleks dapat diturunkan. Maksud Hobbes adalah untuk mengembangkan sebuah studi sistematis dalam tiga bagian, dimulai dengan gerakan-gerakan sederhana dari benda (*De Corpse*), bergerak ke studi sifat manusia (*De Homine*), dan akhirnya ke politik (*De Cive*), dimana masing-masing bagian didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disusun pada analisis yang "lebih rendah".⁴² Pemikiran Hobbes banyak didominasi oleh Galileo daripada Bacon⁴³.

Menanyakan Asal mula agama, Hobbes menegaskan bahwa "ketidaktahuan penyebab alam menjadikan orang mudah percaya. Ketidakmampuan manusia untuk

⁴¹ Prinsip landasan empirisme adalah bahwa persepsi panca indera (termaksud pengamatan langsung dengan panca indera, pengamatan tidak langsung dengan menggunakan peralatan, dan percobaan) merupakan suatu metode satu-satunya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Empirisme tidak menyusun metafika filsafat, tidak mengungkapkan spekulasi atau pandangan dunia yang dimiliki manusia.

⁴² Lessa, Jessa dan Williams Leonard. *Political Theory* volume II. Rajawali Pers, Jakarta, 2005 hal 73

menjelaskan gejala-gejala alam secara rasional. Menempatkan manusia untuk percaya pada sesuatu yang berada diluar dirinya. Membentuk sebuah imajinatif yang nantinya akan dipercaya sebagai sebuah kekuatan yang membentuk dirinya, serta mengalihkan dirinya pada kekuatan-kekuatan yang terbentuk dari khayalannya. Dengan membuat dewa-dewa, dan kepercayaan kepada hal yang absurd merupakan embrio agama”, dan ini dapat dilihat dalam karyanya *Leviathan*;

“Dan mereka sedikit melakukan telaah penyebab segala sesuatunya, atau tidak sama sekali, namun munculnya ketakutan dari ketidaktahuan itu sendiri. Tentang kekuatan yang menimbulkan kebaikan atau kerugian bagi mereka, cenderung membuat mereka menganggap dan meyakini diri sendiri. Beberapa jenis ketakutan yang tidak nampak; dan terpana atas imajinasi mereka sendiri, dimana pada masa sulit keyakinan tersebut membangkitkan mereka. Sebagaimana juga pada saat masa keberhasilan yang mereka harapkan bersyukur padanya; membuat mahluk-mahluk berdasarkan khayalan mereka sendiri, dewa-dewa mereka. Dengan cara-cara ini, dari beragam khayalan, manusia di dunia ini telah menciptakan berbagai jenis dewa yang tak terhingga jumlahnya. Dan ketakutan terhadap hal-hal yang tidak nampak ini adalah bibit - bibit alami dari yang disebut setiap orang pada dirinya sebagai agama; dan apa yang dipuja, atau ketakutan terhadap kekuatan yang tidak mereka miliki, terdapat takhayul”⁴⁴.

Hobbes dalam banyak pernyataannya mempunyai orientasi untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan secara brutal yang kembali pada keadaan alamiah manusia, yaitu saling memangsa antara satu dengan yang lainnya.

“ Secara alamiah manusia memiliki hak atas segala sesuatunya. Hukum fundamental alam... ada kondisi perang dari setiap orang terhadap orang lain; diamnya setiap orang diperintah oleh akal nya sendiri; dan tiada yang bisa digunakan yang mungkin tidak bisa menolongnya, dalam menjaga kelangsungan hidupnya dengan musuh-musuhnya.. dengan demikian, selama hak alami setiap manusia pada segalanya berlangsung, tidak mungkin terdapat keamanan bagi manusia manapun”⁴⁵

⁴⁴ Lihat.. Ibid hal 81

⁴⁵ Lihat.. Ibid hal 99

Maka dalam menyikapi keadaan almah tersebut, diperlukanlah sebuah ketaatan yang mutlak terhadap raja, merupakan solutif yang ditawarkan oleh Hobbes. Dengan terbentuknya negara per-semakmuran yang mendamaikan peran Negara dan agama.

“... Dan konsekwensinya mereka yang telah mendirikan sebuah per-semakmuran, karenanya terikat oleh perjanjian, untuk menyerahkan tindakan-tindakan, atau pertimbangan kepada satu orang, tidak dapat secara sah membuat perjanjian baru, diantara mereka sendiri untuk mematuhi orang lain, dalam hal apa pun tanpa persetujuan darinya. Oleh karena itu mereka menjadi subjek-subjek seorang raja..”⁴⁶

Di Inggris kekuasaan raja dan altar dipangkas pada abad sebelumnya, namun para Filsuf Prancis mengalami gejolak yang berbeda, kekuasaan raja dan yang bersekutu dengan autokrasi yang absolut masih menjamah dalam segala sektor pengetahuan. Maka dalam hal ini ada perbedaan yang signifikan antara para pemikir Inggris dan Prancis mengenai Agama. Bagi para pemikir Inggris Agama memiliki potensi untuk menyatukan. Namun, bagi para pemikir pencerahan Agama menjadi hal yang harus dihilangkan untuk membentuk tatanan masyarakat yang rasional. Menurut Holbach (1723-1789) salah satu tokoh pencerahan, ketidaktahuan manusia tentang alam merupakan faktor utama yang mendasari kekutan-kekutan kaum pendeta yang mencoba untuk menyebarkan kebohongan-kebohongan kepada masyarakat serta mempertahankan kebodohan-kebodohan yang ada agar mereka, para pendeta mempertahankan kekuasaannya. Seperti yang dikatan Holbach;⁴⁷

“Sumber ketidakbahagian manusia adalah mereka mengacuhkan alam... maka tugas kita yang paling penting adalah menciptakan perangkat yang

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Leland, Ms. David, *Ideologi Tanya Akhir Kerasi Wacana*, Yogyakarta, 2005 hal 7

bisa digunakan untuk menghancurkan ilusi, yang tidak pernah bisa melakukan apa-apa selain menyesatkan kita; obat dari penyakit itu harus dicari dari alam sendiri, hanya dengan sumber dayanya yang sangat banyak kita bisa secara rasional berharap menemukan obat bagi kekeliruan yang ditimpakan kepada kita oleh petunjuk yang salah dan oleh antusiasme yang kelewat batas... untuk tujuan ini akal harus dikembalikan pada posisinya yang tepat ... ia tidak boleh lagi ditekan oleh serangkain prasangka yang massif”

Helvetius (1715-1771), pada gilirannya, berbicara tentang “kebijakan-kebijakan prasangka tandingan terhadap kebijakan yang sebenarnya”. Konsep kebijakan yang pertama tidak memberikan sumbangan terhadap kebaikan bersama dan menjadi milik tukang sihir, ahli tenun dan pendeta . Celakanya, dalam sebagian masyarakat-bangsa kebijakan prasangka lebih dihormati dari kebijakan yang sebenarnya. Para pendeta dari agama-agama palsu tertarik untuk bertahan supaya orang-orang tetap bodoh dan mengejar mereka untuk dapat mencerahkan masyarkat. Ini juga terjadi dalam agama sejati pendeta-pendetanya sering mencari pelarian kepada kekejaman yang sama terhadap orang-orang besar.

Dengan pendidikan kata Holbach dan Helvetus yang akan membongkar kebohongan-kebohongan ideologi yang di bentuk oleh kaum gerejawan. Pendidikan yang nantinya akan membuka pikiran masyarakat tentang kebajikan yang selama ini selalu diindetifikasikan dengan surga. Dengan demikian pendidikan akan membentuk warga negara. “ Pemerintah yang waspada, bijak, bebas dari prasangka dan adil yang mencari kebaikan rakyat umum dengan itikad baik tidak membutuhkan dongeng-dongeng, atau kebohongan-kebohongan untuk memerintah subjek-subjek yang pantas.

Dictum (ucapan) Helvetus menjadi masbuh: “L'education naturelle” Manusia dibum...

oleh berbagai prasangka karena dia adalah produk keadaan, ini dapat diubah dengan mendidiknya.⁴⁸

Di dalam gejolak revolusi Prancis ideologi sebagai kajian sistematis keilmuan mulai muncul, dan istilah ideologi itu pertama kali ada. Konsep ini diciptakan pada tahun 1799 oleh Antoine Destutt de Tracy, (1754-1836) salah seorang anggota kelompok filosof yang diberi tanggung jawab oleh konvensi revolusi menjalankan *Institute de France* yang baru berdiri, khusus untuk menyebarkan gagasan-gagasan pencerahan. Tidak lama kemudian institut tersebut mempunyai hubungan patronase dengan Napoleon, yang kemudian menjadi anggota kehormatan sebelum dia bergabung dengan gereja dan sebelum tumbuh kepribadian despotismenya, kemudian menyebabkan perpecahan. Destutt de Tracy seorang bangsawan yang terdidik, dan dia pernah mempelajari karya-karya era pencerahan seperti Voltaire, Holbach dan Condillac.⁴⁹

Dalam karyanya *Element d' Ideologie* ditulis antara tahun 1801 dan 1815, De Tracy membuat gagasan baru tentang ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada pikiran, yang disebutnya sebagai idea-logy. Ilmu tentang ide-ide tersebut harus mengesampingkan prasangka-prasangka metafisik dan agama. Karena Idea-logy tersebut merupakan sebuah pijakan baru yang akan mengembangkan wilayah saint. Sehingga *result* ilmiah harus dilahirkan dari prasangka-prasangka ketidakpastian yang merupakan produk dari ide-ide palsu, dengan menolak bahwa pikiran bukan merupakan sebuah ide bawaan (*innate ide*) yang sudah ada tanpa benturan pada dunia fisik⁵⁰.

⁴⁸ Larrain Jorge, *Konsep Ideologi*; LPKSM Yogyakarta hal 7

⁴⁹ Thompson B John, *Kritik Ideologi Global*; IRCidSoD, Yogyakarta April 2004 hal 51

⁵⁰ Lihat Larrain Jorge *Konsep ideologi*. Op.cit hal 9

Pembentukan ide-ide manusia lahir dari sensasi fisik yang terkontaminasi sensasi masa lalu konsepsionisnya adalah bentuk imitasi masa lampau, proses berfikir tersebut termaksud juga dalam bentuk kemampuan menilai sebuah sensasi yang mempunyai hubungan pada berbagai persepsi. Baginya ideologi adalah bagian dari *zoologi* (ilmu hewan), dan dalam intelek manusia sebagai sebuah hal yang penting dan pantas untuk diselidiki secara mendalam. Karena terbentuknya masyarakat berpendidikan yang juga berdasarkan tertib moral (*moral order*), kesamaan atas asal mula kebutuhan serta hasrat manusia yang universal dapat diketemukan pada saat proses penyelidikan terhadap pola pikir individu, kesamaan atas kebutuhan inilah yang nantinya akan menjadi landasan terbentuknya struktural hukum yang akan menjadi pijakan masyarakat dalam proses interaksinya dan menjadi sebuah ketentuan untuk mengatur dalam mewujudkan tertib sosial. Landasan alamiah yang sejajar dengan pemenuhan kebutuhan yang bersesuaian, merupakan gambaran bahwa alam dan manusia adalah sebuah esensial yang berdampingan dengan penjabaran yang rasional atas keberdaan asal mula pikiran, dan inilah yang disebut sebagai sebuah ideologi.

Menurut David Mc Lelland⁵¹, pada tahap ini awalnya gagasan ideologi bercorak optimistik dan progresif atau memiliki makna konotasi positif. Ideologi dikembangkan sebagai sebuah ilmu yang menghilangkan prasangka-prasangka metafisik dan agama yang mendistorsi pola pikir masyarakat, dan ideologi sebagai sebuah kajian ilmiah menjadikan pendobrak baru yang berguna sebagai basic pendidikan untuk rakyat. Gagasan ideologi De Tracy sendiri bertujuan untuk

⁵¹ Lihat: Lelland, Mc David, *Ideologi Tanpa Akhir*, Log Cihel 10.

memberikan sebuah kerangka *study* bagi para pemuda dan dia secara jelas mengungkapkan bahwa motif pembuatan bukunya adalah sebuah undang-undang yang nantinya akan dijadikan konsepsionis pendidikan bagi rakyat.

Tetapi dimata Napoleon ideologi memiliki makna peyoratif atau makna negatif, kekecewan Napoleon terhadap teman-temanya yang tidak menyetujui tindakan depositnya (lalim), sehingga Napoleon memberikan sebutan kepada teman-temanya tersebut dengan “ideologist” yang menagartikan bahwa ketidak realistisnya pola pikir yang terbentuk dalam diri teman-temanya karena menurut Napoleon mereka tidak memahami tindakan praksis politik. Sehingga mereka menjadi doktriner. Kekusaan Napoleon yang didukung oleh kekuatan agama yang kuat ini merupakan ketidak setujuan ideolog Liberal dan Republikan sehingga disebut sebagai kekusaan yang deposit, dan kemudian Napoleon memberikan kritik terhadap mereka setelah kembali dari Moscow,⁵²

“Kepada ideologi inilah harus kita hubungkan seluruh ketidakberuntungan bangsa Prancis kita yang jaya, sebuah metafisika kabur yang dengan mencari sebab pertama secara teliti, ingin menciptakan atauran kemasyarakatan berdasarkan dirinya, dan bukannya memperoleh hukum kemasyarakatan dari pengetahuan terhadap hati manusia serta pelajaran sejarah”

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Lichthiem, sikap mereka yang dikira ideologis “dalam pengertian ganda yaitu berkenaan dengan ide-ide, dengan mendapatkan kepuasan tujuan-tujuan (mereka sendiri) yang ideal didepan kepentingan-kepentingan materiil di atas tumpuhan masyarakat setelah revolusi”.

Ideologi sebagai ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri, pada waktu yang sama. Pembahasan mengenai agama dan metafisika, sebagai antesenden terpenting dari konsep ideologi yang negatif, terus berkembang tanpa hubungan formal dengan istilah ideologi. Sebenarnya dua alur pemikiran utama, alur yang mengikuti tradisi kritis dari zaman modern yaitu positivisme Prancis dan idealisme Jerman tidak menghubungkan mereka dengan konsep ideologi.

Menurut Immanuel Wallerstein,⁵³ pada abad ke-sembilan belas, ilmu mulai dipostulatkan pada watak objektivismenya dan dikeluarkan dari pikiran, konteks ini berkembang tidak bisa dilepaskan dari keunggulan ilmu (Newtonian) di atas filsafat (spekulatif) dan hal ini menimbulkan prestise tersendiri dalam kajian ilmu sosial. August Comte merupakan salah satu tokoh utama yang mencoba melepaskan kajian ilmu sosial dengan metode spekulatif (imajinatif) dengan menggunakan alur sistematika fisika sebagai metode analisis yang biasanya dikenal sebagai metode “fisika sosial”

Dalam menghidupkan kembali terminologi “fisika sosial” Comte memperjelas perhatian politisnya. Dia berkehendak menyelamatkan barat dari “korupsi sistematik” yang sudah merambat ke dalam aparat pemerintahan yang sangat diperlukan karena “anarki intelektual” yang telah bermunculan setelah Revolusi Prancis. Dalam pandangannya. Para penguasa mendasarkan diri pada doktrin-doktrin kuno (katholik dan feodal); sementara para aktivis gerakan bertumpu pada tesis-tesis yang murni negatif dan destruktif, yang bersumber pada Protestanisme. Bagi Comte, fisika sosial

⁵³ Lihat Wallerstein, Immanuel, *Lintas Batas Ilmu Sosial* LKIS, Yogyakarta 1997, hal 15

akan memungkinkan terjadinya rekonsiliasi antara ketertiban dan kemajuan, dengan mengalihkan solusi mengenai persoalan-persoalan sosial kepada “segelintir cendekiawan elit” melalui pendidikan yang tepat. Dengan cara ini, revolusi akan “diakhiri” oleh instalasi suatu kekuatan spritual yang baru. Jadi, akhirnya dasar teknokratis dan fungsi sosial fisika sosial menjadi jelas.⁵⁴

Dalam struktur pengetahuan baru ini para filsuf berada dalam sebuah rumusan mewah “para spesialis dalam generalitas-generalitas.” Artinya, mereka akan mengaplikasikan logika mekanik caeterial (diambil dari versi Pierre-Simon, Laplace, yang disempurnakan dari prototipe Newtownian) terhadap ilmu sosial. Ilmu positif diharapkan mewakili pembebasan total dari teologi dan metafisika serta semua cara-cara “penjelasan dan realitas”.⁵⁵

Pemikiran manusia menurut Comte berada pada tiga tahap, yang *pertama* teologis, ditahap teologis manusia memohon bantuan kekuatan gaib (*supernatural*) dan segala kejadian didunia dianggap sebagai kehendak kekuatan gaib itu. Manusia menyerah pada semangat benda, pohon dan binatang (*fetisme dan animisme*) kemudian memuja Tuhan yang diyakini bertanggung jawab atas berbagi fase kehidupan (*politeisme*) dan berakhir menyembah satu Tuhan Maha Kuasa (*monoteisme*). Periode ini ditandai oleh dominasi kehidupan militer dan berkembangnya lembaga perbudakan. *Kedua* tahap metafisik, muncul segera setelah manusia menggantikan Tuhan dengan zat atau penyebab yang abstrak. Prinsip-prinsip fundamental tentang realitas difahami dengan nalar. Gagasan kedaulatan , kekuasaan hukum dan pemerintahan berdasarkan

⁵⁴ Wallerstein, *Immanental Lintas Batas Ilmu Sosial* IKIS, Yogyakarta 1997, hal 18.

hukum dominan dalam hukum politik. *Ketiga* adalah tahap positif, yang tercapai setelah menyerahkan hukum yang berdasarkan hukum pada bukti empiris, pengamatan, perbandingan dan eksperimen. Inilah abad ilmu pengetahuan dan industrialisme, segera berkembang pesat, dapat memperkirakan realitas hingga ke tingkat yang makin luas. Pertumbuhan ilmu pengetahuan secara akumulatif dan kualitatif terjadi, setelah kualitas tertinggi pengetahuan positif tercapai. Jadi sejarah manusia adalah sejarah perubahan pemikiran dan masyarakat yang saling menyesuaikan dan mencerminkan satu sama lain⁵⁶.

Karena tujuan Comte dalam mengkonsep sejarah pemikiran manusia yang pada titik fokusnya adalah membangun masyarakat modern mencegah kekecauan negara, yaitu dengan mencoba meredam perubahan yang timbul akibat oleh gerakan-gerakan rakyat. Dalam hal ini Comte bersesuaian dengan pendahulunya yaitu Bacon, tertib sosial bagi Comte merupakan realitas normal yang harus menjadi prospek filsafat, dan ini pendapat Comte;⁵⁷

“... Filsafat positif membantu terciptanya ketertiban rakyat dengan membawa kembali pengertian manusia kepada keadaan normal melalui pengaruh metodenya saja, itu membubarkan kekacauan seketika dengan mengenakan serangkaian syarat-syarat ilmiah dari *study* tentang pertanyaan-pertanyaan politik”

Arti dari pertanyaan ini diperjelas;

“.....karena menjadi nasib sebagian besar orang-orang yang tidak dapat dihindari untuk hidup dari hasil pekerjaan sehari-hari yang sedikit banyak membahayakan, masalah sosial yang besar itu ialah memperbaiki kondisi mayoritas ini, tanpa merusak klasifikasinya. Dan mengganggu perekonomian secara umum, dan ini adalah fungsi dari bentuk kebijakan pemikiran

⁵⁶ Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*; Prenada, Jakarta 2004 hal 118

⁵⁷ Lemaire, Jorge, *Konsep Ideologi, Or. Cit* hal 22

positivistik, yang dianggap sebagai aturan klasifikasi terakhir dari masyarakat modern”

Dampak deterministik yang bagi Comte pada dasarnya merupakan usaha-usaha pengendalian teknokratis terhadap gerakan-gerakan anarkis. Comte melihat bahwa perkembangan sosial masyarakat ditekankan pada proses perubahan pemikiran. Dalam metodologi empiris sebagai metode pembedahan gejala sosial menimbulkan permasalahan yang belum terselesaikan, kedinamisan sifat realitas masyarakat seperti faktor dominasi kekuatan ekonomi yang mendistorsi sistem yang berimbang dalam masyarakat, antara kekuatan dominan dan non-dominan tidak memungkinkan dianalisis dalam bentuk kerangka ilmiah mazhab positivisme yang terbangun waktu itu.

Landasan ideologi selain mengakar di Prancis di Jerman juga, wacana ideologi di Jerman dikembangkan oleh kaum Romantik yang cukup begitu kuat menyikapi dunia yang sedang berkembang. Proses perubahan yang dipicu oleh revolusi industri merupakan embrio Rasionalitas dalam pembentukan analisis. Kaum Romantik⁵⁸ memandang perubahan yang ada dalam realitas diciptakan oleh individual maupun kolektif saat dia menyikapi gejala-gejala yang melingkupinya, Pemikiran ini muncul

⁵⁸Romantisme Jerman adalah suatu pergerakan revolusioner dalam bidang sastra, filsafat, dan seni visual yang lebih menonjol di bidang politik, juga suatu cara pandang baru mengenai dunia yang meningkat dan mendorong kuat dari energi kreatif seniman-seniman Jerman dan kaum intelektual yang menolak pencerahan sebagai suatu filsafat yang dilayani dan didominasi oleh kelas-kelas seperti kelas-kelas matematika

mempengaruhi gerak pemikiran di Jerman, Hegel mencoba mengungkapkan pemikiran ini lebih analitik sistematis dalam menyikapi perkembangan realitas.

Konsep totalitas yang digunakan dalam jangkauan luas semua ilmu, semua seni dan pengetahuan, agama, pemikiran politik, sejarah dimana pun mereka disatukan dalam pemikiran absolut atau jiwa absolut atau Tuhan merupakan realitas utama. Jadi realitas merupakan suatu konsep totalitas rasional yang luas dan kompleks, Totalitas ini merupakan pemikiran absolut dan jiwa absolut.

Keabsolutan dalam totalitas pemikiran merupakan gambaran dari jiwa yang absolut, membentuk kenyataan yang rasional. Dan keabsolutan pemikiran tersebut hanya dimiliki oleh jiwa yang absolut yang berbeda seperti yang ada pada manusia, karena pada dasarnya pemikiran manusia mempunyai keterbatasan. Pemikiran Absolut mempunyai sifat objektif sedangkan pemikiran manusia terbatas pada subjektivismenya. Di lain pihak, dia sadar sifat negatif yang diperoleh dari bentuk (simbol) agama yang kongkrit dan historis. Dengan begitu, Transformasi agama Kristen menjadi sistem otoriter dan dogmatis untuk pertama kali digambarkan sebagai tanggung jawab atas pengasingan (pemindahan) manusia dari dirinya sendiri yang sejati.⁵⁹

Proses alienasi manusia dalam ruang gelap agama mejadikan pembahasan agama hanya bersifat teosentrisme, namun melupakan hakekat autosentrismenya, dan ini merupakan titik awal kritikan Feurbach yang merupakan pengikut Hegel sayap kiri.

Agama bukan hanya permasalahan langit, tapi yang lebih penting bahwa agama juga merupakan relitas yang seharusnya membentuk kesadaran dalam diri manusia

⁵⁹ Lihat Lavine, T. Z. *Pertualangan Filsafat Dari Sokrates ke Sartre*. Jendala, Yogyakarta, 2002 hal 201

untuk mengembangkan dirinya. Agama tumbuh ketika manusia bisa merenungkan dan menilai serta membentuk secara lebih bertanggung jawab lagi cara eksistensinya sendiri. Ringkasnya, benih agama itu tumbuh manakala manusia itu sanggup mentransformasikan cara berekstensinya sendiri. Dalam hal ini, yang menjadi lawannya, ialah kelegahan atau ketidaksadaran, yaitu menjadi binatang ternak yang tenggelam dalam cara eksistensinya sendiri.

Bagi Feuerbach Agama pada waktu itu menempatkan Tuhan dalam realitas yang abstrak, Tuhan hanya ada untuk dirinya sendiri, dengan cara menempatkan Tuhan di dalam singgasana ide, sehingga Tuhan hanya kata-kata yang tidak diketahui keberadaannya oleh manusia yang pada dasarnya berada di alam material yang kongkrit.

Realitas material yang ada pada manusia bukanlah sesuatu yang harus dikontraskan dengan Tuhan, dalam gaya bahasa fenomenologisnya, kita dapat mengartikan materialisme Feuerbach adalah manusia-yang-ada-bersama-alam-semesta. Kebenaran agama dalam hal ini bukan merupakan hasil imajinatif dari kaum penyuluh agama, tapi kebenaran nilai-nilai agama harus ter-transformasikan pada interaksi sosial penganutnya yang seharusnya bersimbiosis pada pentingnya kesadaran manusia yang merupakan pembentuk utama keberadaan agama. Objektivisme terhadap agama harus menjadi landasan dasar untuk membentuk esensi manusia, menempatkan Tuhan pada kesadaran yang terbangun pada alam material, dengan demikian manusia dapat terbebas dari pengasingan yang dibentuk oleh kaum penyuluh agama (pendeta) yang memanfaatkan keberadaan agama sebagai legitimasi kelengkapan otoriterial pada umatnya

Pendekatan Feurbach dapat dianggap sebagai rantai penghubung yang terakhir antara bahasan agama tradisional dan konsep ideologi. Meskipun demikian, konsep ini juga penuh dengan masalah. Marx mengkritik konsepsi ini karena meringkas dari proses sejarah dan menetapkan “sentimen agama” sebagai produk sosial, dan bahwa individu abstrak yang dianalisisnya termaksud bentuk masyarakat tertentu. Menurut Marx istilah ideologi akhirnya mengikuti dan melampaui kritik agama, dengan begitu dia menempatkan sifatnya yang kritis. Kepentingan kritik agama bagi Marx tidak harus dinilai rendah dalam statmennya yang awal bahwa “kritik agama adalah syarat mutlak dari semua kritik”.⁶⁰

Marx akrab dengan pandangan yang positif terhadap ideologi sebagaimana sebuah sains yang bermanfaat tentang ide, dalam karya De Tracy tapi dia lebih memilih sisi kritis yang dipopulerkan oleh cemoohan Napoleon, yaitu “metafisik yang membingungkan” *cloudy metaphysics*. Pelestarian terhadap sisi kritis dan perbedaan alasan untuk menjustifikasi tentang ideologi tersebut membuat tradisi Marxis menjadi menarik. Menurut Marx sendiri makna preyoratif konsep ideologi mencakup dua unsur utama. Pertama, ideologi berhubungan dengan idealisme, sebagai sebuah sudut pandang filosofis, yang tidak bisa dipertentangkan dengan materialisme. Pandangan yang tepat japapun terhadap dunia dalam berbagai pengertian mestilah pandangan kaum materialis. Kedua, ideologi berhubungan dengan ketidaksetaraan distribusi sumber daya dan kekuasaan dalam masyarakat. Kalau tatanan sosial dan ekonomi dicurigai maka begitu pula ideologi yang merupakan bagian darinya

⁶⁰ Larrain Jorge, *Konsep Ideologi: Konsep Ideologi LPKSM 1997* Yogyakarta hal. 27

Penyelidikan terhadap dunia sosial yang merupakan analisis Marx tentang ideologi bukan hanya dalam wilayah agama dan politik sehingga konsepsi ideologi yang terbangun dalam hal ini adalah sebuah ilusi yang terjangkau dalam kuasa agama melalui legitimasi politik. Maka dalam penjelasannya ideologi harus dihubungkan dengan praksis material.

Pemenuhan kebutuhan primer merupakan aspek utama dalam proses pengkajian terhadap realitas kesejarahan, pemenuhan kebutuhan tersebut adalah bentuk keberadaan manusia, sehingga manusia dengan keberadaannya lahir dari penciptaan kebutuhan yaitu dengan cara melakukan kegiatan produksi, dan kegiatan produksi tersebut melingkupi pengolahan alam atas dasar kerja yang dilakukan oleh manusia, kegiatan produksi tersebut merupakan pengolahan alam material menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai pakai.

Maka Kerja merupakan titik tolak awal manusia untuk mengungkapkan keberadaannya yang nanti pada akhirnya keberadaan tersebut menciptakan dunia materilnya baik dalam penciptaan terhadap ilmu sosial sekalipun, Marx mengatakan;

“Penciptaan ide, konsepsi serta kesadaran sangat berhubungan dengan aktivitas material dan hubungan material manusia, yaitu bahasa kehidupan nyata (*language of real life*). Memahami dan berfikir yang merupakan hubungan mental manusia muncul dalam tahap ini sebagai dampak langsung dari tindakan material mereka, hal yang sama juga terjadi pada produk mental manusia lainnya seperti yang tercermin dalam bahasa politik, hukum, moralitas, agama, metafisika dan lain-lain.... manusia yang mengembangkan produksi material dan hubungan material mereka juga mengubah pikiran dan produk pemikiran mereka, bersama dengan dunia aktual mereka ini.”⁶¹

⁶¹ Leland Mc David, *Ideologi Tanpa Akhir*, Kencana, Yogyakarta, 2005, hal. 21

Oleh karena itu ideologi harus dijelaskan dari praktik material. Tetapi, bukan semua ide adalah ideologi dan Marx tidak hanya sekedar menghasilkan sains tentang idenya De Tracy dalam versi yang lebih dinamis. Yang mengubah ide menjadi ideologi adalah hubungan ide itu dengan corak hubungan sosial serta ekonomi yang bersifat konfliktual yang mencirikan proses kerja.

Dengan mengambil tradisi Marxian, bagi Louis Althusser ideologi merupakan sebuah piranti yang dikembangkan untuk mempertahankan corak sistem yang melandasinya, dimana ideologi sebagai sebuah representasi kekuasaan kelas yang berada dalam format perjuangan kelas dalam proses pendominasian kekuatan sistem sosio-produksi masyarakat. Sehingga ideologi disini bukan pada hasil pemikiran manusia, atau hanya berada dalam ruang lingkup kritik terhadap agama, namun dalam praksisnya ideologi adalah realitas material yang akan menentukan paradigma berfikir dari manusia itu sendiri, dalam setiap gerakanya ideologi memanifestasikan dirinya dalam bentuk kelembagaan yang bagi Louis Althusser disebut sebagai *Aparatus Ideologi Negara*.

2. Teori Negara dan Pemerintahan

2.1 Teori Negara

a. Pengertian Menurut Etimologi dan Pertumbuhan Istilah Negara.

Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing

-“staat” {bahasa Belanda dan Jerman};

-“staate”{bahasa Inggris};

-“Etaat” {bahasa Prancis}

Karena pertumbuhan stelsel Negara modern dimulai di Benua Eropa {Angulo Saxson} disekitar abad ke XVII, maka penyelidikan asal usul dan pemakaian kata-kata asing itu dimulai di Benua Eropa.

Istilah "staat" mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad keXV di Eropa Barat. Kata "staat" (state,etat) merupakan alih bahasa dari kata bahasa Latin:"status" atau "statum" (yang artinya:menaruh dalam keadaan berdiri; membuat berdiri;membuat berdiri; menempatkan).Jadi secara etimologi kata "status"itu dalam bahasa Latin klasik merupakan istilah yang abstrak dengan menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap itu. Dari kata latin Klasik tersebut dialih bahasakan kebeberapa istilah lainnya seperti "estate" dalam arti "real estate"atau perwakilan golongan sosial. Dalam arti yang belakangan inilah kata "status" dalam abad ke XVI dipertalihkan atau dihubungkan dengan "negara".⁶²

b. Negara dalam Arti Formil dan Materil

Kita dapat membedakan lagi tentang pengertian negara dalam arti formil dan materil.

Negara dalam arti formil, dimaksudkan Negara ditinjau dari aspek kekuasaan, Negara sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Pemerintahan menjelmakan aspek formil dari negara. Karakteristik dari negara formil adalah; wewenang pemerintah untuk menjalankan paksaan fisik secara legal. Negara dalam arti

⁶² Samidjo, SH, *Ummu Negara*, CV Amico, Bandung, 1986 hal 22

Formil adalah negara sebagai pemerintahan (*staat-overheid*). Negara dalam arti materiil, negara sebagai masyarakat (*staat-gemenschap*) negara sebagai persekutuan hidup⁶³.

c. Pengertian Negara Menurut Beberapa Tokoh

Menurut Logemann, bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan (= pertambahan kerja / *werkverbosnd*) yang mempunyai tujuan kekuasaanya mengatur serta menyelenggarakan kekuasaanya mengatur suatu masyarakat, Organisasi itu suatu pertambahan jabatan-jabatan, atau lapangan-lapangan kerja (*werkkring*) tetap.⁶⁴

Menurut Bellefroid, mengatakan bahwa Negara itu suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat bersama.⁶⁵

Menurut George Jellinek yang mendapatkan gelar “Bapak Ilmu Negara”, pengertian Negara adalah merupakan gabungan manusia yang terorganisir di suatu daerah tertentu yang dilengkapi dengan suatu kekuasaan asli akan pemerintah.⁶⁶

Menurut Prof. Mr. R, Kranerburg, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut sebagai bangsa, dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan bersama” sedang organisasinya negara bersifat sekunder.⁶⁷

Maka dari beberpa tokoh diatas menurut penulis, Negara dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang terorganisir dalam suatu lingkun kelangkaan yang mempunyai:

kekuatan hukum yang mengikat manusia-manusia yang berada dalam lingkup kekuasaan negara.

d. Negara menurut Marx - Leninis

Teori pertentangan kelas memandang bahwa pada dasarnya masyarakat, baik yang bersifat individu maupun kelompok berada dalam konflik dan ini menjadi hal tidak terhindarkan, Konflik yang ada akan menimbulkan proses dominasi dan subdominasi.

Marx merupakan Tokoh yang paling penting dalam teori kelas tersebut. Pendekatan kelas merupakan analisis pokok yang diajukan oleh Marx untuk melihat ketimpangan pola produksi yang membentuk rangkaian hubungan produksi yang mengharuskan penindasan terhadap kelas proletariat yang dilakukan oleh kelas borjuis atas kepemilikan modal yang mengukuhkan penguasaan terhadap alat-alat produksi.

Kemunculan kelas itu sendiri diakibatkan oleh kontradiksi untuk pemenuhan produksi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan adanya surplus dari kerja produksi tersebut yang menjadi syarat munculnya ketidakadilan sosial. Dengan kemunculan kelas-kelas yang berbeda dan antagonistik, kelas-kelas produktif dan kelas berkuasa, memberikan syarat kelahiran Negara yang merupakan institusi utama untuk mempertahankan kondisi ketidakadilan sosial tersebut.

Dan berikut ini adalah pengertian Negara dalam kajian Marxisme, yang mencapai beberapa ruang lingkup menurut Lenin,

a. Negara sebagai produk dari tidak terdamaikannya kontradiksi kelas

Negara merupakan sebuah manifestasi dari antagonisme Kelas, Keberadaan Negara sebagai kepentingan kelas yang secara objektif bertentangan, sehingga eksistensi Negara merupakan bentuk tidakterdaimaiknya kontradiksi kelas. Seperti yang dikatakan F. Engels dalam , *The Origin of the Family, Private Property and the State* (“Asal-Usul Keluarga, Milik Perseorangan, dan Negara”) menyatakan ;

“Negara, dengan demikian, adalah sama sekali bukan merupakan kekuatan yang dipaksakan dari luar kepada masyarakat, sebagai suatu sesempit ‘realitas ide moral’, ‘bayangan dan realitas akal’ sebagaimana ditegaskan oleh Hegel. Malahan, Negara adalah produk masyarakat pada tingkat perkembangan tertentu; Negara adalah pengakuan bahwa masyarakat ini terlibat dalam kontrakdisi yang tak terpecahkan dengan dirinya sendiri, bahwa ia telah terpecah menjadi segi-segi yang berlawanan yang tak terdamaikan dan ia tidak berdaya melepaskan diri dari keadaan demikian itu. Dan supaya segi-segi yang berlawanan ini, kelas-kelas yang kepentingan-kepentingan ekonominya berlawanan, tidak membinasakan satu sama lain dan tidak membinasakan masyarakat dalam perjuangan yang sia-sia, maka untuk itu diperlukan kekuatan yang nampaknya berdiri di atas masyarakat, kekuatan yang seharusnya meredakan bentrokan itu, mempertahankannya di dalam ‘batas-batas tata tertib’; dan kekuatan ini, yang lahir dari masyarakat, tetapi menempatkan diri di atas masyarakat tersebut dan yang semakin mengasingkan diri darinya, adalah Negara (hlm. 177-178, edisi bahasa Jerman yang ke-enam)..⁶⁸

b. Negara Sebagai Kesatuan Kekuatan Bersenjata

Negara merupakan sebuah kekuatan yang mengornisasikan diri sebagai kekuatan di atas masyarakat, yang pada akhirnya akan menjauhkan diri dari masyarakat dengan membuat kekuasaan bersenjata, seperti yang dikatan Engel:

”Ciri kedua yang membedakan ialah ditegakkannya kekuasaan kemasyarakatan yang sudah tidak sesuai secara langsung dengan penduduk yang mengorganisasi diri sebagai kekuatan bersenjata. Kekuatan kemasyarakatan yang khusus ini perlu, karena organisasi

⁶⁸ Lenin, Negara dan revolusi , sumber;

<http://www.marxists.org/indonesia/arkhiva/lenin/1917/negara/tatal.htm> diakses pada tanggal 15 Januari

bersenjata yang bertindak sendiri dari penduduk menjadi tidak mungkin sejak terpecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas... Kekuasaan kemasyarakatan ini ada di dalam setiap Negara. Ia tidak hanya terdiri dari orang-orang bersenjata saja, tetapi juga terdiri dari embel-embel materiil, yaitu penjara dan segala macam lembaga pemaksa, yang tidak dikenal oleh susunan masyarakat gens (klan)

Kesatuan kekuatan bersenjata yang terbentuk pada dasarnya tidak berkesuaian dengan kekuatan bersenjata yang dibutuhkan rakyat, karena kekuatan bersenjata tersebut telah menjadi bagian alat represifitas kelas penindas. Karena kesatuan kekuatan bersenjata itu bejalan sesuai dengan komando Negara.

c. Negara sebagai Kelas penghisap kaum tertindas .

Untuk mempertahankan kekuasaan Negara sebagai manifestasi kepentingan kelas yang berkuasa, Negara harus melindungi kelas yang berkuasa dengan cara memberikan hak istimewa untuk para pejabat agar mempunyai legalitas menindas rakyat, seperti yang dikatan Engel,

“Dengan memiliki kekuasaan kemasyarakatan dan hak untuk memungut pajak,” tulis Engels, “maka para pejabat, sebagai organ masyarakat, kini berdiri *di atas* masyarakat. Rasa hormat yang bebas dan sukarela kepada organ-organ masyarakat gens (klan) sudah tidak cukup bagi mereka, bahkan andaikatapun mereka dapat memperolehnya”.... Dibuatlah undang-undang khusus tentang kesucian dan kekebalan para pejabat. “Seorang agen polisi yang paling hina” mempunyai “otoritas” yang lebih besar daripada wakil-wakil klan, tetapi bahkan kepala kekuasaan militer negara beradab bisa ber-iri hati kepada seorang pengetua klan yang menikmati “rasa hormat yang diperoleh tanpa paksaan” dari

2.2 Teori Pemerintahan

Menurut Marium, Pemerintahan adalah segala kegiatan atau usaha yang terorganisir, bersumber kepada kedaulatan yang berlandaskan dasar Negara, mengenai rakyat/ penduduk dan wilayah (Negara itu) demi tercapainya tujuan Negara.⁷¹

Istilah pemerintahan merujuk pada bidang atau lapangan fungsi, bidang tugas pekerjaan, dan istilah pemerintah merujuk kepada badan, organ, aparat, alat perlengkapan yang menjalankan fungsi itu.⁷²

Jika ditinjau dari aspek struktural-fungsional, pemerintahan adalah suatu sistem (struktur atau organisasi) daripada berbagai macam fungsi yang atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara. Perkataan *sistem, struktur, dan Organisasi* mengandung arti bahwa semua macam fungsi itu berhubungan dan berkaitan serta independent. Tugas dan Fungsi itu hanya bisa dilaksanakan kalau disertai ke- wenangan (*authority*) dan kekuasaan (*power*). Karena itu orang juga mengatakan pemerintahan adalah kekuasaan negara.⁷³

3. Strukturalisme

a. Pengertian Struktur

Menurut Beny H. Hoed⁷⁴ struktur adalah sebuah bangunan yang terdiri atas berbagai unsur yang satu sama lain berkaitan . Dengan demikian, setiap perubahan yang terjadi pada sebuah unsur struktur akan mengakibatkan hubungan antara unsur

⁷¹ Mariun, Azas-Azas Ilmu Pemerintahan; Badan Penelitian dan pengembangan, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 19 79 hal 3

⁷² Ibid hal 5

⁷³ Ibid hal 4

⁷⁴ Piaget, Jean, *Strukturalisme: Yayasan Ober Indonesia*; Jakarta 1995 Kota Denpasar

berubah pula, jadi perubahan antar unsur akan mengatur sendiri, bila ada unsur yang berubah atau hilang. Inilah yang dimaksud dengan pengaturan diri atau *otoregulasi*.

Menurut Piaget⁷⁵, struktur merupakan sistem transformasi, yang mengandung kaidah sebagai sistem (sebagai lawan dari sifat unsur-unsur) dan melindungi diri dan memperkaya diri melalui peran transformasinya itu, tanpa keluar dari batas-batasnya atau menyebabkan masuknya unsur-unsur luar. Pendek kata, sebuah struktur mencangkup tiga sifat yakni; Totalitas, Transformasi, dan Pengaturan diri (*autoreglage* atau *otoregulasi*)

Totalitas, Sebuah struktur harus dilihat sebagai sebagai sebuah totalitas, Meskipun terdiri atas sejumlah unsur, di dalam sebuah struktur unsur-unsur itu berkaitan satu sama lain dalam sebuah kesatuan. Dilihat secara hirarkis, sejumlah struktur terdiri atas sejumlah sub-struktur yang terikat oleh struktur besar

Transformasi, Struktur bukanlah suatu yang statis, struktur merupakan sesuatu yang dinamis karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah transformasi. Dengan demikian, konsep struktur tidak terbatas pada konsep terstruktur (*structure*), tetapi juga dalam pengertian proses menstruktur (*structurant*)

Otoregulasi ; Struktur adalah bangunan atas berbagai unsur yang satu sama lain berkaitan, Dengan demikian, setiap perubahan yang terjadi pada sebuah unsur struktur akan mengakibatkan hubungan antara unsur menjadi berubah pula. Jadi, hubungan antar unsur akan mengatur sendiri bila ada unsur yang berubah atau hilang. Inilah yang

b. Ciri-ciri Strukturalisme

Dalam kajian analisis teori yang menggunakan strukturalisme, biasanya memenuhi kaidah sebagai berikut (Fages, 1968; dikutip oleh Nort 1995; 295).⁷⁶

- a. *Imanensi*; Analisis *structural* melihat struktur dalam rangka *system* dan dalam prespektif sinkronis. Jadi, struktur adalah suatu bangun yang abstrak yang komponen-komponennya terikat dalam suatu jaringan relasi, baik di dalam struktur (secara sintagmis) maupun ke luar struktur (secara asosiatif).
- b. *Partinensi*; Analisis *structural* melihat makna suatu komponen *structural* dengan mengidentifikasi ciri pembeda, diantara komponen tersebut dengan komponen-komponen yang lain dalam rangka suatu sistem. Akhirnya ciri pembeda itu sendiri lebih dipentingkan daripada komponennya sendiri.
- c. *Komutasi*; Analisis *structural* menggunakan tes komutasi, yakni tes oposisi pasangan minimal untuk mengidentifikasi ciri pembeda antara satu komponen struktur dengan komponen lain dalam suatu sistem.
- d. *Kompatibilitas*; Analisis *structural* melihat komponen-komponen *structur* dalam rangka kombinasi dan berkesesuaian antara komponen (relasi sintagmatis).
- e. *Integerasi*; Analisis struktural melihat struktur sebagai satu kesatuan (totalitas) dalam suatu sisitem.
- f. *Sikronasi* sebagai dasar analisis diakronis; Analisis diakronis adalah analisis berdasarkan poros waktu (memperlihatkan perkembangan), sedangkan

⁷⁶ Usanto, Irzanti dan Anggari, Ari Harapan .*Parancis dan Kita ;Srtukturalisme Sejarah Politik dan Bahasa*; Wedatama Widya Sastra, Jakarta 2003 hal 3

analisis sinkronis adalah analisis pada satu lapisan waktu dan ruang dalam poros waktu. Dalam melakukan kajian diakronis, analisis *structural* bertumpu pada lapisan-lapisan analisis sinkronis.

- g. *Fungsi*:. Analisis *structural* melihat komponen-komponen struktur dalam suatu sistem sebagai memiliki fungsi tertentu.

c. Tokoh-Tokoh Strukturalisme

1. Claude Levi-Strauss

Claude-Levis Straus dilahirkan di Brussel pada tahun 1903, Levis Strauss merupakan tokoh yang begitu fenomenal dalam kajian merespons proses mental yang merupakan sifat dari seseorang yang dianggap ganjil biasanya disebut sebagai kaum primitif⁷⁷, Komitmentnya terhadap metode strukturalist bersifat total dan lugas ini dapat dilihat dari buku yang ditulisnya seperti; *The elementary Structures of Kinsip* (1949), atau *structural Antropology* yang terbit 2 volume (1958 dan 1973), dalam karyanya tersebut, dia meyakini bahwa strukturlisme merupakan sebuah metode yang cocok untuk memahami data empiris tentang institusi pertalian keluarga, lambang suku (totemisme) dan mitos.⁷⁸ Pola penyelidikan yang dilakukan dalam pengembangan data-data empiris yang ada dengan tujuan untuk proses identifikasi pemikiran manusia baik yang subjektif maupun universal. Bapak Strukturalisme Prancis yang diberikan kepadanya merupakan hal yang cukup logis dan mendasar, karena Claude Levis-Strauss menjadikan Strukturlisme mempunyai identitas sendiri dalam kajian keilmuan, dan

⁷⁷ Lihat "Buku Strukturalisme" oleh Claude Levi-Strauss, Bandung: Mizan, 1992, hal. 10.

begitu jarang para penganut strukturalis yang mengakui dirinya adalah penganut strukturalisme dikarenakan akan membatasi kebebasan berfikir, dan Levis Strauss merupakan tokoh yang begitu bangga dengan strukturalismenya.

Dalam Bukunya *Les structures elementaries de la parate* (Struktur- struktur element kekerabatan) yang diterbitkan pada tahun 1949, Levis-Strauss menarik perhatian dunia terpelajar, Disini dia berikhtiar menganalisa dan menerangkan sistem-sistem kekerabatan primitif (*kinship sistem*) dengan memakai metode strukturalis, sebab ada alasan-alasan kuat yang memungkinkan menyertakan kekerabatan dengan objek linguistik, Dengan kata lain, kekerabatan semacam bahasa. Apa sebabnya ? aturan-aturan yang diakui oleh klan-klan primitif di bidang kekerabatan dan perkawinan memang merupakan sebuah sistem. Dan sistem ini terdiri dari relasi-relasi dan posisi-posisi suami isteri, bapak-anak, saudara laki-laki saudara perempuan, titik singgung lain ialah bahwa sama dengan bahasa, kekerabatan merupakan sistem komunikasi juga. Bahasa adalah sistem komunikasi, karena warta-warta atau amanat-amanat yang disampaikan individu kepada individu lain, kekerabatan adalah sistem komunikasi, karena klan-klan atau famili-famili (atau grup-grup sosial lainnya) tukar-menukar wanita-wanita mereka. Sebagaimana bahasa merupakan pertukaran, komunikasi, dialog demikian kekerabatan. Dan karena bahasa dan kekerabatan adalah dua fenomen yang dapat ditrafnkan, maka dua-duanya dapat diselidiki dengan metode yang sama.

2. Jacques Lacan

Pemikir dari Prancis berikutnya ini, Jacques Lacan yang menggunakan

analisis strukturalismenya, Lacan membaca karya Freud, ini merupakan hal yang paling penting dan sederhana tentang Lacan, Motivasi yang jelas murni ditunjukkan dengan lamanya penyelidikan yang dia lakukan terhadap karya-karya Freud, yaitu selama empat puluh tahun,⁷⁹ Lacan mengemukakan tugas utamanya sebagaimana halnya membaca karya Freud secara baik dan menjadikan dia benar atau membenarkannya, Pernyataan yang diproklamirkan menjadi slogan pribadinya yaitu “kembali pada Freud”, mengandung kritikan Lacan kepada para teotisi yang melihat Freud begitu parsial dan melupakan pengaruh dan pentingnya pemikiran Freud, pengonsepsian pemikiran Freud yang dilakukan oleh teoritis yang dikritik Lacan, yaitu sub akademik yang hanya memandang pemikiran Freud dalam segi komoditas, karena ketidak komperhensifan pemahaman terhadap Freud, pemahaman yang dikembangkan lebih sebagai penghalang untuk memahami Freud, daripada mengonsepsikan solusi yang menarik untuk kontribusi terhadap proses penelitian ilmiah dalam menjabarkan realitas mental.⁸⁰

Lacan berikhtiar membuat psikonalisa menjadi antropology otentik dengan mengambil ilmu linguistik sebagai pedoman. Menurut Lacan yang diambil dari Freud, Kesadaran bukanlah hal yang dianggap sebagai pusat manusia yang mutlak dan otonom, dalam hal ini manusia berada dalam ruang alinasi yang terusir dari titik kesadarannya. Manusia tidak lagi tuan dari penguasa rumahnya sendiri, Anggapan ini merupakan revolusi dibidang pandangan manusia, konsepsi kesadaran sejak Descartes, dengan menyelami ketidaksadaran, Freud memperlihatkan pada manusia suatu lapisan yang lebih mendalam. Suatu taraf yang tidak sadar (*inconchiciunes*) serta anonim, Adapun

usaha Lacan menjelaskan ketidak sadaran didalam penemuan-penemuan Linguistik tentang bahasa. Bahasa (dalam arti *langue a La de Sausure*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari relasi-relasi dan oposisi-oposisi yang mempunyai prioritas terhadap subjek yang bicara, manusia tidak merancang sistem tersebut, tetapi sebaliknya ia takluk kepadanya. Dan Justru ketaklukan ini yang memungkinkan bahwa ia dapat berbicara, menurut Lacan hal yang sama juga terjadi dalam ketidak sadaran, ketidaksadaran adalah semacam logos yang mendahului manusia perseorangan. Manusia menyesuaikan diri dengannya dan mendengarkannya. Ketidaksadaran merupakan suatu struktur, tetapi manusia tidak menguasai struktur.

3. Louis Althusser

Jika kita lihat tadi dari beberapa tokoh yang diungkapkan diatas, penjabaran strukturalisme dengan metodologi Linguistik menggunakan baik yang menggunakan basis analisis antropologi dan psikonalisis, telah memberikan prespektif baru tentang proses alinasi yang terjadi, maka Louis Althusser memberi sebuah kajian yang berdasarkan analisis Marxian.

Ada yang cukup mengejutkan, Althuser begitu enggan disebut sebagai Marxisme Strukturalis, dan dia bahkan berjuang begitu keras untuk menolak penyebutan tersebut atas pemikiran yang dituangkan dalam beberapa karyanya, seperti yang dikatakan oleh Fredic Jameson⁸¹, Pemikiran yang coba dikembangkan oleh Louis Althusser bukanlah sebuah filsafat yang berbasis-bahasa. Dia Menganggap “struktur” (sebuah kata yang

⁸¹ Althusser Louis. *Filsafat Sebagai Saniata Revolusi*. Resist Book. Yogyakarta 2007. di kata pengantar

enggan dia ungkapkan), bukan sebagai sebuah pasangan biner yang saling bertentangan, namun sebagai sebuah level-level yang terpisah-pisah, dan yang saling berelasi satu sama lain dimana setiap level bersifat semi-otonom dan memiliki logika-logika yang khas. Bagi Althusser, yang eksis hanyalah *satu* struktur yaitu modus produksi. Dalam penjabaran ini Althusser mengungkapkan karya Marx dalam *Das Kapital*, bahwa Syarat-syarat mode produksi yang terbentuk akan menentukan suatu sistem yang membentuk kesadaran manusia, manusia bukanlah realitas subjektif yang otonom terpisahkan dari realitas mode produksi yang terbentuk, bergerak dialektik dalam alur sejarah.

Memandang usaha filosofis dalam kajian strukturalisme-nya Althusser sebaiknya tidak dianggap sebagai suatu unsur aliran yang lebih luas, pemikirannya harus dilihat dari sebagai suatu usaha dari rigoros (keketatan) untuk memperlihatkan relevansi pemikiran Marx bagi keadaan kongkret di Prancis, tetapi dalam mewujudkan usaha itu ia tersentuh dalam suasana strukturalis pada waktu itu, tidak mudah disangkal, misalkan ia juga menganut pendirian yang khas strukturalisme seperti anti-humanisme dan anti-historis.⁸²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh melaksanakan penelitian dengan taraf pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk menyimpulkan fakta-fakta atau arsip-arsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah.

Adapun hal ini metode penelitian meliputi :

⁸² Bertens, Kees, *Filsafat Barat Abad XX: Prancis Jilid II*: Gramedia Pustaka Utama 1996, hal 438

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang lebih menitik beratkan untuk memahami dan menjelaskan situasi tertentu, bukan hanya mencari sebab akibat yang diteliti. Tujuan penulisan biasanya menjadi alasan dari pelaksanaan penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian sosial, dimana data yang dikumpulkan dinyatakan dalam bentuk nilai relatif dan hasilnya bersifat obyektif serta berlaku sesaat dan setempat.⁸³

Maka metode yang dipakai adalah Metode penelitian Kepustakaan (Library riseach) adalah pemanfaatan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, tegasnya riset kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa melakukan riset lapangan.⁸⁴

Ciri utama study kepustakaan adalah, *Pertama*; penelitian berhadapan langsung dengan teks dan data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan, *Kedua*; data pustaka siap pakai. *Ketiga*; data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan merupakan data orisinil dari tangan pertama dilapangan. *Keempat*; data pustaka tidak dibatasi oleh ruang waktu.⁸⁵

2. Unit Analisa

Unit analisa adalah satuan data terkecil yang merupakan obyek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok pembahasan masalah dalam penelitian. Unit analisa data berisikan penegasan tentang kesatuan yang menjadi obyek

⁸³Prof. Ir. Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 113

⁸⁴Zed. Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2004, hal. 1

dan subyek penelitian. Dalam kegiatan penyusunan unit analisa data ini unit analisisnya adalah pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisa adalah peran ideologi dalam Aparatus Negara menurut Louis Althusser.

3. Jenis Data

Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang kita peroleh dari unit analisis yang dijadikan sebagai sarana verifikasi empiris dalam kegiatan penelitian. Adapun data jenis-jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang diteliti. Data yang diperoleh adalah literature yang berupa kutipan dari media massa, buku-buku, internet, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis oleh Louis Althusser seperti *Filsafat Sebagai Senjata Revolusi, Tentang Ideologi, For Marx* Dari data tersebut penulis mengumpulkan data sehingga dapat menarik kesimpulan se-obyektif mungkin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yang berupa data dalam bentuk dokumentasi. Dalam tehnik penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dengan membaca buku-buku dan semua data yang berkaitan dengan

5. Teknik analisis data

Teknik analisa data penulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yakni teknik yang mendasarkan pada data kualitatif atau merupakan data dari wujud dari kata-kata tertulis menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan.⁸⁶ Teknik kualitatif terdiri dari tiga alur, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁸⁷ Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, pada penyederhanaan , pengabstrakan data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data dilakukan dalam rangka untuk menemukan unitasi dan teknik pencatatan secara mendetail, terutama dtentang bahasa data dan makna data yang akan dibahas lebih dalam dlam pengumpulan data. Kegiatan analisis ketiga adalah yang paling penting adalah kesimpulan, penarikan kesimpulan hanya merupakan sebagai sebuah kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

⁸⁶ Lihat..Lexi. J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kulitatif*; PT. Remaja Rodaskarya, Bandung 1994, hal 3

⁸⁷ Lihat. Methew. B. Milles et al. *Analisa Data Kualitatif*; UII. Press. Jakarta 1993 hal 52